

Id : 15897

Call Number : 344.01 JHO A

Judul : Analisis Perjanjian Kerja antara Universitas Kristen Indonesia dengan Pekerja Satpam berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Contoh Kasus Putusan No54/PHI.G/2010/PN.JKT.PST)/ oleh Robbi Jhoni

Pengarang : JHONI, ROBBI

Nim : 205060165

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : ix, 81 hal. bibli. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.Mulati

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.PERJANJIAN KERJA

Abstrak :
 abstrak A>Nama : Robbi Jhoni (NIM : 205060165) B.Judul Skripsi :Analisis Perjanjian Kerja antara Universitas Kristen Indonesia dengan Pekerja Satpam berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Contoh Kasus Putusan No54/PHI.G/2010/PN.JKT.PST) C.Halaman :ix + 81 + Lampiran + 2010 D.Kata Kunci :Pekerja Satpam, UKI, Jeda Waktu, Perjanjian Kerja. E. Isi: Dalam dunia pekerjaan terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan bidang hukum, terutama hukum perburuhan. Dalam hukum perburuhan diatur mengenai perjanjian kerja yang terbagi dalam dua bentuk perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Seperti contohnya pada kasus Universitas Kristen Indonesia dengan pekerja satpam, dimana pekerja satpam bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Apakah perpanjangan perjanjian kerja antara UKI dengan pekerja satpam sudah sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? Teori-teori yang dipakai adalah teori perjanjian kerja, hubungan kerja dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, didukung dengan wawancara kepada ahli hukum, serta praktisi hukum di bidang hukum perburuhan. Data penelitian memperlihatkan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis maksud perpanjangan perjanjian kerja serta tidak diberikannya

tenggang waktu oleh UKI kepada para pekerja satpam.
Kesimpulannya adalah perpanjangan perjanjian kerja yang dibuat oleh UKI dengan pekerja satpam tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 4, 5 dan 6 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Saran penulis adalah sebaiknya pengusaha membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan para pekerja kontrak sebaiknya mengatur setiap butir-butir perjanjian kerja secara detail dan dengan itikad baik, serta pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja dan memberikan sanksi yang tegas agar memberikan kepastian hukum kepada para pekerja waktu tertentu. F.Acuan :21 (1968-2009)
G.Pembimbing :Hj. Mulati, S.H., M.H Penulis : Robbi Jhoni